

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada pergeseran sistem pemerintah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Secara esensi sebenarnya kemandirian bukan hanya terletak pada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) saja haruslah dari level terbawah yaitu, pemerintah desa.

Pemerintah desa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap Desa di Pimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa secara demokratis . Kepala Desa dalam penyelenggaran Pemerintah Desa dibantu oleh Perangkat Desa, yaitu sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sementara lembaga yang terlibat dalam Pemerintah Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan penting dalam Penyelenggaran Pemerintah Desa, termasuk pengelolaan keuangannya. Lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran Pemerintah Desa.

Pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa, kewenangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan, baik kepada masyarakat desa maupun kepada

pemerintah pusat/daerah. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa merupakan bentuk hubungan antar tingkat pemerintah/kabupaten dengan pemerintah desa. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan desa, pelayanan sosial masyarakat desa. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah desa. Anggaran dalam instrumen kebijakan menduduki posisi yang sangat sentral, oleh karena itu anggaran harus memuat kinerja. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yaitu berupa perbandingan antara komponen yang terdapat pada anggaran.

Kinerja belanja menjadi tolak ukur untuk menilai, melihat kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang entitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sehingga mampu mengelola pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Hubungan kinerja belanja pada realisasi anggaran belanja sangatlah berhubungan dimana kinerja belanja menjadi nilai hasil kerja daerah dengan menggunakan anggaran daerah yang telah di setuju oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan diterima untuk dikelola entitas serta entitas yang memperoleh kepercayaan mampu bertanggung jawab dalam membuat laporan realisasi anggaran belanja agar

dapat melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengelola pengeluaran keuangan untuk memajukan daerah.

Untuk mengetahui seberapa baik dalam besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. Secara teknis dalam penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas bukan hanya sekedar menunjukkan kemampuan uang publik dibelanjakan, akan tetapi menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. *Efisien* yaitu penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, *Efektif* merupakan penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, kemudian *ekonomis* yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Dengan adanya otonomi desa, maka pemerintah desa memberikan suatu inovasi dalam sistem pemerintah ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri dalam pengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan. Pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat fenomena terkait belanja desa di desa kuanheun kecamatan kupang barat kabupaten kupang, dimana dalam pengelolaan dana desa yang tidak tepat sasaran dan kurang optimal. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para pengelolaan dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa.

Berikut ini adalah laporan anggaran dan realisasi belanja pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Kuanheun**  
**Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2019</b>	Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa	342.298.600,-	336.945.212,51
	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa	472.676.000,-	465.627.650,-
	Bidang Pembinaan masyarakat Desa	26.000.000,-	26.000.000,-
	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	397.651.000,-	392.401.000,-
	Bidang Tak terduga	1.872.850,-	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.240.498.450,-</b>	<b>1.220.973.862,51</b>
	<b>Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2020</b>	Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa	343.975.513,-	343.975.080,-
	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa	212.104.881,-	211.640.881
	Bidang Pembinaan masyarakat Desa	11.461.495,-	11.461.495,-
	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	46.143.818,19	46.143.818,-
	Bidang Tak terduga	457.945.000,-	457.945.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.071.630.707,19</b>	<b>1.071.825.149.88</b>
	<b>Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
	Bidang penyelenggaraan	365.093.914,-	360.167.955,40

<b>2021</b>	pemerintah Desa		
	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa	155.838.325,-	155.838.325,-
	Bidang Pembinaan masyarakat Desa	12.169.000,-	12.169.000,-
	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	82.678.975,-	82.678.975,-
	Bidang Tak terduga	601.200.000	601.200.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.216.980.214.00</b>	<b>1.203.470.698.40</b>
	<b>Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2022</b>	Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa	407.125.162,64	336.602.112,-
	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa	386.245.800,-	278.871.000,-
	Bidang Pembinaan masyarakat Desa	14.198.000,-	14.198.000,-
	Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	212.655.200,-	125.380.280,-
	Bidang Tak terduga	399.600.00,-	199.800.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.419.824.162,64</b>	<b>954.851.112</b>

*Sumber: Desa Kuanheun*

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 – 2022 terdapat perbedaan yang relatif kecil antara anggaran dan realisasi, menunjukkan penggunaan dana yang hampir sesuai dengan yang direncanakan. Namun, masih ada sedikit sisa anggaran yang tidak digunakan. Namun pada tahun 2022 terjadi perbedaan yang sangat besar antara anggaran dan realisasi. Penggunaan dana yang jauh lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeloaan keuangan desa belum efektif. Tidak terealisasinya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Hal ini dapat menunjukkan ada beberapa kendala atau faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran belanja desa sehingga realisasi anggaran tidak dapat mencapai target yang direncanakan. Oleh karena itu perlu

dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran tersebut.

Berbagai penelitian mengenai kinerja belanja desa telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu antara lain: Masithoh (2019) yang berjudul Analisis Kinerja Belanja pada Kantor Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2018 ini menggunakan alat ukur rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja, rasio varian belanja, dan rasio keserasian belanja sebagai dasar untuk menilai kinerja belanja desa Sebuntal. Hasil analisis yang diumumkan dapat diketahui bahwa Analisis Pertumbuhan Belanja tahun anggaran 2017-2018 tergolong negatif dengan kriteria turun karena hingga laporan realisasi anggaran tahun 2017 dan dibawahnya laporan tersebut belum disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran yang benar. Rasio Efisiensi tahun anggaran 2017-2018 relatif efisien karena kantor desa sebuntal mampu mengelola keuangannya. Analisis Varian Belanja tahun 2017-2018 cukup baik, dengan realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya. Analisis Keserasian Belanja tahun anggaran 2017-2018 cukup sesuai.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Melind (2018) yang berjudul Kinerja Belanja Desa pada Kantor Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan ini menggunakan alat ukur rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja, rasio varian belanja, dan rasio keserasian belanja sebagai dasar untuk menilai Kinerja Belanja Desa Loa Duri Ulu. Hasil analisis yang dikemukakan dapat dilihat bahwa kinerja belanja tahun anggaran 2016-2017 ditinjau dari

analisis variansi pada kantor desa Loan Duri relatif baik, dengan realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya sehingga hipotesis pertama ditolak. Kinerja belanja tahun anggaran 2016-2017 ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja pada desa Loan Duri tergolong negatif dengan kriteria menurun sehingga hipotesis kedua diterima. Kinerja belanja tahun anggaran 2016-2017 ditinjau dari analisis kesesuaian belanja pada desa Loa Duri tergolong tidak konsisten dengan kriteria 20-40% sehingga hipotesis diterima. Atas dasar penelitian terdahulu maka peneliti juga memilih rasio pertumbuhan belanja, rasio efisiensi belanja, rasio varian belanja dan rasio keserasian belanja untuk mengukur Kinerja Belanja Desa di Desa Kuanheun

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Analisis Kinerja Belanja Desa di Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Tahun 2019-2022**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja belanja dilihat dari rasio pertumbuhan belanja?
2. Bagaimana kinerja belanja dilihat dari rasio varian belanja?
3. Bagaimana kinerja belanja dilihat dari rasio efisiensi belanja?
4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja belanja di Desa Kuanheun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja belanja dilihat dari rasio pertumbuhan belanja
2. Untuk mengetahui kinerja belanja dilihat dari rasio varian belanja
3. Untuk mengetahui kinerja belanja dilihat dari rasio efisiensi belanja

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja belanja di  
Desa Kuanheun

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai Analisis Kinerja Belanja Desa pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang.

2. Bagi Desa Kuanheun

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi dalam menganalisis kinerja anggaran belanja

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi peneliti lain yang sejenis dengan penelitian ini.